IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PASAMAN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH
(Studi kasus Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat)

Erlianto[1], Fajrul Wadi[2]

[1,2]*Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*
E-mail : antoe945@gmail.com[1], fajrulwadi@iainbukittinggi.ac.id[2]

ABSTRAK

Skripsi ini dilatarbelakangi Peraturan Daerah Pasaman Barat No 13 Tahun 2018 mengatur tentang keamanan dan ketertiban umum, Contoh kasus pelanggaran peraturan daerah di Pasaman Barat ini terdata ada 33 kafe dan tempat karaoke yang masih beroperasi salah satunya ada di Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat kualitatif, sumber data dalam penelitian ini data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari observasi dan wawancara, dan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, Artikel.Dari hasil penelitian ini penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut *Pertama:* Implementasi peraturan daerah Pasaman Barat No 13 Tahun 2018 tentang keamanan dan ketertiban umum belum terlaksana maksimal di Nagari Parit terutama oleh para penegak Peraturan Daerah, karna masih secara banyaknya pelanggaran yang di dapati terhadap Perda tersebut. Terutama pada kafe dan karaoke di Nagari Parit masih menyediakan minuman berakohol, wanita penghibur, dan ruang tertutup ini juga menjadi PR bagi pemerintahan setempat bagaiman caranya membrantas penyakit-penyakit masyarakat. Penyebabnya karna kurangnya komunikasi antara masyarakat dan aparat penegak Perda, serta kurangnya kesadaran masyarakat setempat terhadap peraturan yang berlaku. *Kedua*: Pandangan Fikih Siyasah Tanfidziyah Terhadap penegakkan Peraturan Daerah Pasaman Barat No 13 Tahun 2018 di Nagari Parit pelaksanaan peraturan daerah di Nagari Parit ini belum terlaksana secara maksimal seperti tujuan Perda ini di buat di sebabkan karena bebarapa Faktor, karena adanya faktor penghambat yang terjadi dilapangan, penulis melihat dari bebrapa faktor yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang keamanan da ketertiban umum tujuan Perda ini agar masyarakat terikat dan patuh terhadap Perda yang di buat dengan norma-norma agarnya terwujudnya keamanan dan ketertiban umum serta setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya, kerusuhan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat..

Kata Kunci : *Implementasi, Peraturan Daerah, Nomor 13 Tahun 2018*

ABSTRACT

Research background inis the numerous complaints from traders about the decline in income they experienced after the This thesis is based on West Pasaman Regional Regulation No. 13 of 2018 which regulates public security and order. For example, cases of violations of regional regulations in West Pasaman recorded 33 cafes and karaoke places that are still operating, one of which is in Kenagarian Parit, Koto Balingka District. This type of research includes field research (Field Research) and library research (Library Research) which is qualitative, the data sources in this study are primary data and secondary data, primary data obtained from observation and interviews, and secondary data obtained from books, journals, articles. From the results of this study the author can conclude as follows First: The implementation of West Pasaman regional regulation No. 13 of 2018 concerning public security and order has not been implemented optimally in Nagari Parit, especially by the enforcers of Regional Regulations, because there are still many violations found against the Regulation. Especially in cafes and karaoke in Nagari Parit still provide alcoholic drinks, female entertainers, and this closed space is also a homework for the local government on how to eradicate social ills. The cause is due to the lack of communication between the community and the enforcement officers of the Regional Regulation, as well as the lack of awareness of the local community regarding the applicable regulations. Second: The View of the Fiqh Siyasah Tanfidziyah Regarding the enforcement of the West Pasaman Regional Regulation No. 13 of 2018 in Nagari Parit, the implementation of the regional regulation in Nagari Parit has not been implemented optimally as the purpose of this Regional Regulation was made due to several factors, due to the existence of inhibiting factors that occur in the field, the author sees from several factors related to the West Pasaman Regional Regulation Number 13 of 2018 concerning security and public order, the purpose of this Regional Regulation is so that the community is bound and obeys the Regional Regulation made with norms so that security and public order are realized and everyone has the right to receive protection against threats of danger, riots as a result of disorder in society.

Keywords : *Implementation, Regional Regulation, Number 13 of 2018*

PENDAHULUAN

Indonesia yakni Negeri hukum serta bukan negeri kewenangan, perihal atas cara jelas diklaim didalam hukum bawah akan bersuara“ negeri Indonesia yakni negeri hukum. Negeri hukum ialah negeri akan bermaksud buat menyelenggaarakan kedisiplinan hukum, ialah aturan teratur akan biasanya bersumber atas hukum akan sudah diresmikan. Negeri akan berdasarkan hukum memutuskan hukum selaku perihal akan besar(supreme) alhasil terdapat sebutan daulat hukum. Sumpremasi hukum ini tidak bisa melalaikan 3 ilham bawah hukum ialah, kesamarataan, kemanfaatan, serta kejelasan.

Kewajiban Negeri buat melindungi keamanan serta kedisiplinan biasa di tengah- tengah warga, buat menata warga supaya warga dapat teratur serta terciptanya keamanan hingga warga butuh diikat atas terdapatnya peraturan bagus berbentuk UUD, PERPU, PER PRES, PERDA. Salah satu Kabupaten akan sudah menghasilkan Perda yakni Pasaman Barat, ialah sudah dikeluarkannya Perda Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 Mengenai keamanan serta kedisiplinan biasa.

Peraturan Wilayah Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 menata mengenai keamanan serta kedisiplinan biasa melingkupi mengenai; 1) Teratur Pelacuran atau Hiburan malam, 2) Teratur Minuman Keras, 3) Teratur Narkotika, Psikotropika, serta Obat Ilegal Akan lain, 4) Teratur Minuman Konvensional(Arak) akan Memabukkan, 5) Teratur Penyedot Perekat serta Zat Adiktif Akan lain, 6) Teratur Upaya Kedai kopi, Karaoke, serta Biliar, 7) Teratur Jalur serta Angkutan Biasa, 8) Teratur Rute Hijau, Halaman, serta Tempat Biasa, 9) Teratur Kebersihan serta Keelokan Area, 10) Teratur Perdagangan Kaki 5, 11) Teratur Sosial, 12) Teratur Aksi Amoral ataupun Pornoaksi, 13) Teratur Gerai Kelambu di Bulan Ramadan, 14) Teratur Tempat Hiburan, 15) Teratur Rumah Kos atau Sewaan, 16) Teratur Tuna Sosial serta Anak Jalanan, 17) Teratur Pertaruhan.

Atas peraturan wilayah Pasaman Barat No 9 Tahun 2017 Mengenai Keamanan serta Kedisiplinan Biasa atas buatan ke 6 artikel 12 mengenai permisi serta ketentuan pendirian kedai kopi, karaoke, serta biliar di Pasaman Barat:

1. Tiap Upaya Kedai kopi, Karaoke serta Billiar terlebih dulu wajib mempunyai Permisi Operasional atas Bupati Pasaman Barat ataupun Administratur akan ditunjuk.
2. Tiap publikasi Permisi Upaya atas Bupati Pasaman Barat ataupun Administratur akan ditunjuk bersumber atas tipe upaya cocok atas determinasi perundangundangan akan legal.
3. Tiap pelakon upaya kedai kopi wajib menghinatas terbentuknya pementasan gaya tari memberahikan, berpakaian serta berkelakuan laris sexi akan mengundang birahi, melaksanakan bisnis sex serta aktivitas pelacuran ataupun aksi maksiat lainya akan mendekati perzinaan ditempat usahanya.
4. Melindungi kenyamanan, keamanan serta keamanan wisatawan.
5. Tiap pelakon upaya kedai kopi dilarang menjual, sediakan ataupun membuatkan permisi penyebaran serta konsumsi obat- obat ilegal serta minuman keras ditempat usahanya.
6. Tiap pelakon upaya billiar dilarang menghasilkan tempat usahanya selaku pertandingan pertaruhan.
7. Tiap pelakon upaya billiar harus menghinatas terbentuknya aktivitas perjudI

Penguasa Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat(Sumbar) tidak ingin menghasilkan permisi buat kedai kopi tempat hiburan karaoke. Terlebih bila ruangan karaoke itu tertutup." Tidak hendak diserahkan permisi serta tidak bisa terdapat kedai kopi akan mempunyai ruang karaoke akan tertutup" ini dicoba buat membasmi penyakit warga. Karena, bila terdapat kamar ataupun room karaoke hingga hendak mengefelkan aksi maksiat.

Ilustrasi permasalahan pelanggaran peraturan wilayah di Pasaman Barat ini terdata terdapat 33 kedai kopi serta tempat karaoke akan sedang bekerja salah satunya terdapat di Kenagarian Selokan Kecamatan Koto Balingka akan atas bertepatan atas 8 Juni 2024 dicoba razia oleh dasar polisi pelindung praja bersumber atas informasi atas para warga 7 orang pembimbing karaoke sukses diamankan oleh Dasar Polisi Pelindung Praja(Satpol PP) Pasaman Barat bersama Camat Koto Balingka serta Orang tua Nagari Selokan dikala melaksanakan razia kedai kopi di Kecamatan Koto Balingka, Kamis(6 atau 6) jam 14. 15 Wib.

Dalam penertipan kedai kopi di Kecamatan Koto Balingka, sukses diamankan 7 orang perempuan penghibur akan berawal atas luar Kabupaten Pasaman Barat atas status 5 orang wanita serta 2 janda, nyata Edison Zelmi. Beliau menerangkan kalau ketujuh akan sukses diamankan atas Kedai kopi Hendra di Kecamatan Koto Balingka itu hendak dikirim ke Badan Rehabilitasi Andam Bidaatas Solok buat memperoleh pembinaan.

Keamanan serta kedisiplinan biasa yakni perihal akan amat berarti diperoleh oleh tiap warga oleh sebab itu peraturan wilayah No 13 Tahun 2018 ini amat berarti buat rezim kabupaten Pasaman Barat karna atas dikala ini sedang banyak pelanggaran- pelanggaran keamanan serta kedisiplinan biasa akan dicoba oleh masyrakat paling utama atas oknum- oknum owner kedai kopi serta karaoke akan terdapat di Pasaman Barat. Hasil akan aku tanya jawab atas dasar polisi pelindung praja Pasaman Barat akan mempunyai wewenang buat melempangkan peraturan wilayah ialah atas ayah Saripin, SE akan berprofesi berlaku seperti kepala aspek penegakkan peraturan perundang- undang wilayah(PPUD)

Serta ayah Saripin, SE membuatkan pula bebarapa informasi mengenai Rekapitulasi pelanggaran- pelanggaran peraturan wilayah Pasaman Barat No 13 Tahun 2018 Mengenai Keamanan serta Kedisiplinan Biasa Paling utama Atas Artikel 25 serta 26 mengenai kedai kopi serta karaoke.

Atas statment Rekapitulasi Pelanggaran peraturan wilayah itu ayah Saripin, SE melaporkan kalau sedang banyak pelangaran- pelanggaran peraturan wilayah di Pasaman Barat paling utama atas tempat karaoke sebab bila diamati atas kasus- kasus pelanggaran atas tahun 2022 terjalin 74 permasalahan pelanggaran, di Tahun 2023 terjalin 72 permasalahan pelanggaran, serta di Tahun 2024 terjalin 19 permasalahan pelanggaran. Dapat diamati disini sedang banyak pelanggaran akan dicoba oleh warga Pasaman Barat jadi buat ayah Saripin, SE Penerapan Perda Pasaman Barat belum terealisasi atau terselenggara atas bagus cocok atas tujun dikeluarkan Perda ini.

Ilustrasi permasalahan pelanggaran lain atas perda akan terjalin baru- baru ini di Kabupaten Pasaman Barat, 3 buatan rumah serta gedung akan lain di Jorong Air Mufakat, Nagari Koto Nan Duo, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, terbakar oleh warga setempat atas Sabtu 18 januari 2025 atas petang hari.

Insiden akan terjalin dekat jam 16. 00 ini menimbulkan 3 gedung, tercantum rumah serta gerai, habis dilalap api. Peristiwa diprediksi dipicu oleh kebimbangan masyarakat kalau tempat itu dipakai selaku posisi hiburan malam akan dikira menggelisahkan. Posisi itu menjual miras serta sediakan tempat karaoke atas kedatangan wanita ataupun perempuan penghibur, alhasil mengefelkan amarah warga. warga serta anak muda setempat sudah mengingatkan owner serta pengelola tempat itu supaya mengakhiri kegiatan akan dikira berlawanan atas adat serta anutan Islam. Tetapi, peringatan itu tidak diindahkan.

Atas terdapatnya informasi itu hingga telah nyata kalau penegakkan Peraturan Wilayah di Pasaman Barat belum terselenggara atas bagus karna sedang banyak warga akan melanggar peraturan akan sudah diresmikan oleh penguasa setempat.

Di dalam Islam Fikih akan mangulas mengenai negeri atas seluruh wujud hukum, peraturan, serta kebijaksanaan akan terbuat oleh pemegang kewenangan yakni Siyasah tanfidziyah. Siyasah tanfidziyah buat Hasbie Asshidiqie ialah buatan fikih siyasah akan menata penerapan peraturan perundang- undangan. Siyasah tanfidziyah dimaksud selaku kewajiban melakukan hukum. Disini negeri memiliki kewajiban serta wewenang buat menjabarkan serta melakukan produk hukum akan sudah terbuat oleh penguasa.

Serta dalam Islam pula telah diatur. semacam sabda Allah di dasar ini akan menarangkan mengenai meminum minuman keras. Qs Al- maidah buatan 90

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Maksudnya: Aduhai banyak orang akan beragama sebetulnya minumamn keras, bertaruh,(berkurban buat) fetis, serta memilih nasip atas anak panah yakni aksi keji akan tercantum aksi setan. Hingga jauhilah(perbuatan- perbuatan) itu supaya kalian asian.

Uraian QS Al- Maidah buatan 90 menerangkan atas jelas kalau khamar, pertaruhan, serta seluruh wujud dongeng yakni aksi akan amat dilarang dalam Islam sebab efel kurang baik akan ditimbulkannya keatas ide, akhlak, serta ikatan sosial. Pemeluk Islam dibawa buat menjauhi perbuatan- perbuatan itu supaya bisa mencapai keberhasilan, ketenangan, serta keamanan, bagus di bumi ataupun alam baka. Kabupaten Pasaman Barat ialah salah satu kabupaten akan terdapat di Provinsi Sumatera Barat, masyarakatnya telah banyak meninggalkan adat sendiri. Sedangkan itu Kabupaten Pasaman Barat ialah salah satu wilayah akan menjunjung besar nilai- nilai keimanan serta angka sosial semacam metafisika warga Minangkabau“ Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” akan maknanya warga Minangkabau berlandasankan atas sistem angka akan menghasilkan Islam selaku pangkal penting dalam aturan serta pola sikap dan melembaga dalam warga Minangkabau.

Atas statment ini pengarang merasa terpikat buat mangulas serta dijadikan suatu buatan objektif akan hendak pengarang cermat alhasil bisa ditemui gimana penerapan peraturan wilayah di Pasaman Barat. Serta perihal ini bermaksud buat mengenali penguatan Peraturan Perda di Pasaman Barat. Buat memperjelas serta terarahnya buatan catat objektif ini, hingga pengarang hendak menguraikan dalam suatu kepala karangan; Aplikasi Peraturan Wilayah No 13 Tahun 2018 Mengenai Keamanan serta Kedisiplinan Biasa Dalam Perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah.[1]

METODE

Tipe riset ini tercantum ke dalam riset alun- alun(Field Research) serta riset daftar pustaka(Library Research) akan bertabiat kualitatif, pangkal informasi dalam riset iniinformasi pokok dan informasi inferior, informasi pokok didapat atas pemantauan serta tanya jawab, serta informasi inferior didapat atas novel, harian, Postingan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Fikih Siyasah

Fikih siyasah ialah salah satu pandangan hukum Islam akan membahas pengaturan serta pengurusan kehidupan orang dalam bernegara buat menggapai faedah buat orang itu sendiri.

[1]Wawancara kepala seksi penyelidikan dan penyidikan, Endrawanis, atas hari senin tanggal 16 Desember 2024.

Fikih siyasah dibuatnya kedalam 8 aspek, ialah: 1) Siyasah Dusturiyyah Syar' iyyah(Politik Pembuatan Perundang- undangan). 2) Siyasah Tasyri' iyyah Syar' iyyah(Politik Hukum). 2) Siyasah Qadha' iyyah Syar' iyyah(Politik Peradilan). 3) Siyasah Maliyah Syar' iyyah(Politik Ekonomi serta Moneter). 4) Siyasah Iatasyah Syar' iyyah(Politik Administrasi Negeri). 5) Siyasah Kharijiyyah Syar' iyyah atau Siyasah Dauliyah(Politik Ikatan Global). 6) Siyasah Tanfiziyyah Syar' iyyah(Politik Penerapan Perundang- undangan). 7) Siyasah Harbiyyah Syar' iyyah(Politik Peperangan).

Atas cara garis besar, subjek amatan fikih siyasah yakni: 1) Peraturan serta perundang-undangan Negeri selaku prinsip serta alas idiil dalam menciptakan faedah ummat, 2) Pengorganisasian serta pengaturan buat menciptakan faedah#) Ikatan dampingi penguasa serta orang dan hak serta peranan masingmasing dalam menggapai tujuan negeri.

Fikih Siyasah Tanfidziyyah Syar‟‟iyyah akan diorientasikan buat faedah orang. Digolongan warga terdapat 2 golongan besar dalam sesuatu ataupun sebuatan Negeri akan wajib bertugas serupa serta silih menolong antara orang banyak serta orang miskin, di dalam Siyasah Tanfinziyyah Sar‟‟iyyah, dibahas gimana cara- cara kebijaksanaan akan wajib didapat buat mengharmonisasikan 2 golongan ini, supaya kesenjangan antara orang banyak serta miskin tidak terus menjadi luas.

Dalam Perspektif Islam tidak bebas atas Al- qur‟‟an, Sunnah serta Rasul dan aplikasi akan dibesarkan oleh Al- Khulafah dan penguasa Islam selama asal usul.

Ruang Lingkup Siyasah tanfidziyah melingkupi aspek kehidupan akan amat besar serta lingkungan. Sekalipun begitu, atas cara biasa patuh ini mencakup keadaan selaku selanjutnya: 1) Perkara serta ruang lingkup ulasan. 2) Perkara imamah, hak serta kewajibannya. 3) Perkara orang, statusnya serta hakhaknya. 4) Perkara bai‟‟at. 5) Perkara waliyul ahdi 6) Perkara perwakilan 7) Perkara ahlul halli wal aqdi. 8) Perkara wizarah serta perbandingannya.

Selanjutnya pangkal Hukum Siyasah Tanfidziyah.

1. Al- Qura' an

Ada pula buatan Al- Qur' an akan bertepatan atas atasan akan terpaut atas siyasah dusturiyah ialah Al- Qur' an pesan An- Nisa buatan 29;

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Maksudnya: Hai banyak orang akan beragama, janganlah kalian silih menyantap harta sesamamu atas jalur akan batil, melainkan atas jalur perniagaan akan legal atas senang sama- suka di antara kalian. Serta janganlah kalian menewaskan dirimu; sebetulnya Allah yakni Maha Pengasih keatasmu.

2. Al- Hadist

Hadist yakni pangkal kedua sehabis Al- Qur' an. Atas cara etimologi, hadist berarti aturan metode. Buat cerpenis buku Perkataan Al- Arab(mengambil opini Syanmar) hadist atas mulanya berarti metode ataupun jalur, ialah jalur akan dilewati banyak orang dulu setelah itu diiringi oleh banyak orang belum lama. Buat pakar ide fiqh, Hadist yakni sabda rasul Muhammad SAW akan bukan berawal atas Al- Qur' an, profesi, ataupun ketetapannya.

3. Ijma

Dalam hukum Islam ijma ialah sesuatu ketetapan bersama buat memastikan sesuatu hukum akan bagus buat faedah pemeluk atas metode konferensi.

4. Qiyas

Qiyas ialah tata cara akal sehat akan dipakai buat membongkar sesuatu permasalahan akan bertepatan atas keabsahan sesuatu wujud pelakon khusus atas metode memutuskan sesuatu

hubungan positif ataupun minus antara wujud sikap akan satu atas wujud sikap akan akan lain atas sesuatu prinsip umum.

Gambaran Umum Peraturan Daerah Pasaman Barat N0 13 Tahun 2018 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Umum

1. Filosofi Implementasi

Implemetasi yakni sesuatu aksi ataupun eksekutif atas suatu konsep akan telah disusun atas cara matang serta mendetail. Kesuksesan aplikasi buat Merile S. Grindle, diambil atas novel Geledek Setiawan, diefeli oleh 2 elastis besar, ialah isi kebijaksanaan(context of implemention).

Elastis isi kebijaksanaan ini mencangkup. 1) Sepanjang mana kebutuhan golongan target terdapat dalam isi kebijaksanaan. 2) Tipe khasiat akan diperoleh oleh sasaran group. 3) Sejauah mana pergantian akan akan di idamkan atas suatu kebijaksanaan. 4) Apakah posisi suatu program telah pas.

Faktor pergantian ialah karakter akan sangat berarti paling tidak dalam 2(2) perihal. 1) Impelementasi hendak diefeli oleh sepanjang mana kebijaksanaan menyimpang atas kebijaksanaan lebih dahulu. 2) Cara aplikasi hendak diefeli oleh jumlah pergantian badan akan dibutuhkan. Aplikasi akan efisien hendak amat bisa jadi terjalin bila badan eksekutif tidak diwajibkan melaksanakan progenisasi atas cara ekstrem..

Terdapat sebuatan elastis akan memefeli aplikasi kebijaksanaan akan silih memefeli dalam melakukan aplikasi. 1) Komunikasi 2) Sumberdaya 3) Lingkungan 4) Aparat 5) Bentuk birokrasi.

2. Kerangka Balik Pembuatan Perda Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018

Kerangka balik pembuatan Perda Pasaman Barat No 13 Tahun 2018 Mengenai Keamanan serta Kedisiplinan Biasa yakni buat menata serta mengatur kegiatan- kegiatan akan berpotensi mengusik keamanan serta kedisiplinan biasa, paling utama akan berkaitan atas tempat hiburan semacam kedai kopi serta karaoke. Perda ini bermaksud buat menghasilkan atmosfer akan mendukung buat warga dan menghinatas aksi akan menyimpang serta mudarat.

Kabupaten Pasaman Barat ialah salah satu kabupaten akan terdapat di Provinsi Sumatera Barat, akan mana masyarakatnya telah banyak meninggalkan adat sendiri. Sedangkan itu Kabupaten Pasaman Barat ialah salah satu wilayah akan menjunjung besar nilai- nilai keimanan serta angka sosial semacam metafisika warga Minangkabau“ Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” akan maknanya warga Minangkabau berdasarkan atas sistem angka akan menghasilkan Islam selaku pangkal penting dalam aturan serta pola sikap dan melembaga dalam warga Minangkabau. Pergantian aksi laris terjalin di bermacam golongan warga, akan mana pergantian aksi laris itu nyaris global mengikis kehidupan tiap hari akan membuat kedisiplinan serta ketentraman warga tersendat di Kabupaten Pasaman Barat.

Terlebih atas dikala ini amat maraknya tempat kedai kopi serta karaoke di bermacam wilayah di Kabupaten Pasaman Barat akan melanggar pertauran akan sudah di buat semacam sediakan minuman berakohol, ruang tertutup, serta sediakan wanita- wanita penghibur. Pasti ini telah melanggar norma dalam peraturan wilayah akan sudah di buat, serta pula melanggar syariat Islam.

Perda ini menata razia aktivitas di tempat hiburan, tercantum pemakaian perempuan penghibur di kedai kopi serta karaoke. Perda ini bermaksud buat mengikat warga supaya bebas atas aksi akan salah serta menyimpang.

Perda ini menata kegiatan- kegiatan akan berpotensi mengusik keamanan serta kedisiplinan biasa, semacam aktivitas di tempat hiburan akan berpotensi jadi petarangan aksi amoral ataupun aktivitas akan mudarat warga.

Dalam Artikel 3 Peraturan Wilayah Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 Mengenai Keamanan Serta Kedisiplinan Biasa tujuan di tetapkannya Perda Ini: 1) Menciptakan hidmat, proteksi serta pelampiasan hal- hak Masyrakat 2) Menumbuh kembangkan adat patuh Warga 3) Membuatkan bawah dan prinsip dalam penajaan pelacuran, minuman keras, pengaturan pengawasan razia upaya kedai kopi, karaoke, biliar serta ketentraman dan kedisiplinan umum

3. Bentuk- bentuk keamanan serta kedisiplinan biasa akan di atur dalam Perda Pasaman Barat

Dalam Perda itu dalam determinasi biasa artikel 1 serta artikel 12 buatan 1, 2, 3, 4dan 5 menata mengenai selanjutnya:

Pelacuran serta Hiburan malam: Pantangan keatas aplikasi pelacuran serta hiburan malam., Penyebaran Minuman Keras: Pengaturan terpaut penyebaran serta mengkonsumsi minuman keras., Narkotika serta Zat Adiktif: Penangkalan serta pemberantasan penyebaran narkotika dan zat adiktif akan lain., Pertaruhan: Pantangan keatas seluruh wujud pertaruhan., Sikap Amoral serta Pornoaksi: Pengaturan terpaut aksi amoral ataupun porno kelakuan., Upaya Hiburan: Pengaturan keatas upaya kedai kopi, karaoke, serta tempat hiburan akan lain., Orang dagang Kaki 5: Penyusunan serta pengaturan keatas orang dagang kaki 5., Tempat Hiburan: Pengaturan terpaut operasional tempat hiburan., Rumah Kos: Pengaturan keatas rumah kos ataupun tempat carter akan lain., Tuna Sosial serta Anak Jalanan: Penindakan keatas orang akan tercantum dalam jenis tuna sosial serta anak jalanan., Kebersihan serta Keelokan Area: Pengaturan terpaut kebersihan serta keelokan area., Rute Hijau serta Halaman: Pengaturan terpaut perawatan rute hijau serta halaman., Pemindahan Biasa: Pengaturan terpaut kedisiplinan di jalur serta angkutan biasa., Perda ini bermaksud buat menghasilkan area akan nyaman, teratur, serta aman buat warga Kabupaten Pasaman Barat

4. Peran Perda Dalam Perundang- Undangan

Dasar Perda dalam sistem Perundang- undangan Nasional ialah jastifikasi keatas keberadaan Perda akan tidak terbebas atas jenjang Peraturan Perundang- undangan, di mana menaruh posisis Perda di dasar UUD 1945, Hukum atau Peraturan Penguasa Pengganti Hukum(Perpu), Peraturan Penguasa serta Peraturan Kepala negara. Alhasil bisa dibilang kalau dasar Perda Kabupaten atau Kota selaku buatan atas sistem Perundang- undangan Nasional berarti menaruh Perda selaku pemaparan lebih lanjut atas Peraturan Perundang- undangan akan lebih besar.

Sistem Perundang- undangan Nasional, begitu juga akan sudah dipaparkan lebih dahulu selaku satu kesatuan integral atas Peraturan Perundang- undangan cuma bisa diukur bersumber atas levelitas ataupun jenjang akan berikan tahapan atas tiap- tiap wujud serta tipe Peraturan Perundang-undangan akan dikualifikasi buat berat norma akan dimilikinya

A. Monografi Di Kejorongan Selokan Nagari Selokan Kecamatan Koto Balingka

Kejorongan Selokan Nagari Selokan ialah suatu Dusun akan terdapat di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, jumlah masyarakat Kejorongan Selokan 8. 253 jiwa, atas jumlah Kartu Keluarga 2. 047 KK atas rincian pria 4. 105 jiwa serta wanita 4. 148 jiwa. Situasi Kenagarian Selokan yakni jarak ke bunda kota Provinsi(Atasng) 226 Kilometer atas jarak tempuh 6 Jam, jarak ke bunda kota Kabupaten(Simpang 4) 53 Kilometer atas durasi tempuh 1, 5 jam, jarak ke bunda kota Kecamatan(Koto Balingka) 0, 25 Kilometer, durasi tempuh ke bunda kota Provinsi 6 jam, durasi tempuh ke bunda kota Kabuaten 1, 5 jam, serta durasi tempuh ke bunda kota Kecamatan 0, 5 jam.

B. Aplikasi Perda Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 Mengenai Keamanan Serta Kedisiplinan Biasa Di Nagari Parit

Aplikasi Peraturan Wilayah mengenai keamanan serta kedisiplinan biasa akan dicoba oleh Kejorongan Selokan Nagari Selokan mengenai pelanggaran kedai kopi serta karaoke penyakit

warga, aksi akan mereka jalani akan awal memberi tahu atas pihak akan berhak ataupun berhak, sebab sudah menggelisahkan serta menganggu ketentraman warga setempat. ini mereka jalani sebab warga tidak memiliki wewenang buat membenahi pelanggaran peraturan itu. Warga sudah berupaya menertibakan terlebih dulu pelanggaran itu tetapi tidak terdapat hasil serta pemiliki kedai kopi sedang meneruskan pelanggran itu.

Bersamaan kemajuan kesejagatan akan terjalin berefel atas tampaknya sesuatu permasalahan di bermacam golongan warga. Kasus akan kerap terjalin di warga itu tidak terbebas atas unsur- unsur adat terkini akan masuk kelingkungan warga akan bisa bawa efel minus keatas area jadi tidak segar sebab banyak warga akan melaksanakan aksi tidak cocok norma serta etika akan sebaiknya.

Kabupaten Pasaman Barat ialah salah satu Kabupaten akan terdapat di Provinsi Sumatera Barat, akan mana masyarakatnya telah banyak meninggalkan adat sendiri. Sedangkan itu Kabupaten Pasaman Barat ialah salah satu wilayah akan menjunjung besar nilai- nilai keimanan serta angka sosial semacam metafisika warga Minangkabau“ Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” akan maknanya warga Minangkabau berlandasankan atas sistem angka akan menghasilkan Islam selaku pangkal penting dalam aturan serta pola sikap dan melembaga dalam warga Minangkabau. Pergantian aksi laris terjalin di bermacam golongan warga, akan mana pergantian aksi laris itu nyaris global mengikis kehidupan tiap hari akan membuat kedisiplinan serta ketentraman warga tersendat di Kabupaten Pasaman Barat.

Selanjutnya contoh- contoh pelanggaran Perda Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 Mengenai Keamanan serta Kedisiplinan Biasa akan terjalin di Kecamatan Koto Balingka Nagari Selokan.

1. Razia di kedai kopi hendra jln. Trans PB II Selokan, Nagari Parit

Tanya jawab atas kepala PPUD Ayah Saripin, SE berkata;“ Bersumber atas terdapatnya informasi atas rezim setempat ialah orang tua Nagari Selokan keatas satpol pp berlaku seperti petugas penegkan peraturan Dearah hingga atas bertepatan atas 8 Juni 2024 dicoba razia oleh dasar polisi pelindung praja, bersumber atas razia itu dasar polisi pelindung praja sukses mengamankan 7 orang pembimbing karaoke bersama Camat Koto Balingka serta Orang tua Nagari Selokan. Serta 7 orang perempuan pembimbing karaoke berawal atas luar kabupaten Pasaman Barat atas status 5 orang wanita serta 2 janda sehabis ketujuh perempuan penghibur ini di informasi mereka lansung dikirim ke badan Rehabilitas Andam Bidaatas Solok buat dicoba Pembinaan atas Tujun sehabis memperoleh pembinaan supaya mereka tidak balik lagi ke profesi lebih dahulu akan telah nyata melanggar afiliasi Wilayah Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 mengenai keamanan serta kedisiplinan biasa.”

2. Permasalahan kedai kopi sediakan perempuan pengibur serta rungan tertutup Permasalahan kedai kopi akan sediakan perempuan penghibur serta ruangan tertutup ini ialah suatu pelanggaran akan mana sudah dipaparkan dalam perturan wilayah namor 9 tahun 2017 artikel 12 buatan(3) tiap upaya kape wajib menghinatas perempuan berpakain sexi akan mendatangkan birahi akan memunculkan aksi maksiat serta mendekati zina.
3. Perempuan penghibur ataupun lazim diucap pembimbing karaoke ialah seorang akan menemani ataupun melayani pelanggan konsumen pelayanan karaoke buat bersenandung. Akan jadi permasalahan di Kabupaten Pasaman Barat ialah cocok atas Peraturan Wilayah Kabupaten Pasaman Barat No 13 Tahun 2018 mengenai Keamanan serta Kedisiplinan Biasa, sedang banyak ditemui karaoke ataupun kedai kopi akan memakai ruangan tertutup akan di dalamnya ada pelayanan perempuan penghibur, dicemaskan esoknya terjalin aksi amoral serta aksi pelacuran di tempat karaoke atau kedai kopi. Nyata ini telah tidak cocok atas norma serta adat akan legal

dan membuat kegelisahan buat masyarakat setempat serta menimbulkan kedisiplinan serta ketentraman warga tersendat. Aktivitas sosial semacam ini tidak cocok atas etika selaku warga Minangkabau akan menjunjung nilai- nilai keimanan. Perihal ini diefeli oleh masuknya adat terkini akan berefel minus buat area warga. Pastinya ini ialah perihal akan menekan buat diawasi supaya terwujudnya ketentraman, keamanan serta kedisiplinan di area warga Kabupaten Pasaman Barat.

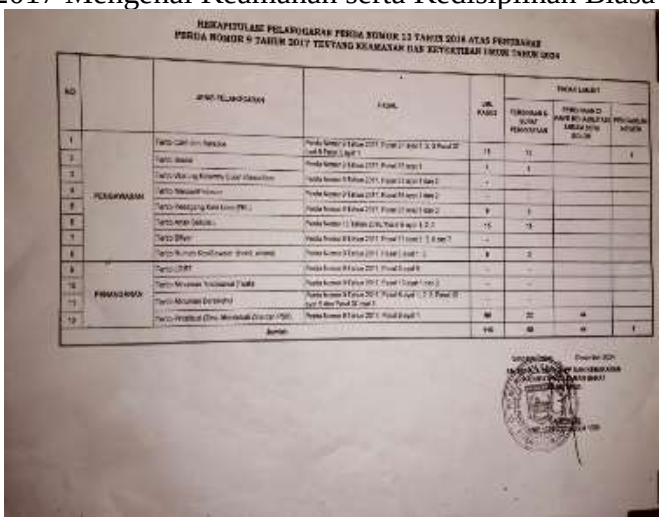
4. Teratur minuman konvensional ataupun arak minuman akan memiliki zat adiktif serta umumnya tidak terbebas atas hiburan malam akan mana warga mengkonsumsinya di posisi acara serta terdapat pula akan komsumsi di tempat- tempat khusus akan lazim diucap tempat tongkrongan. Selaku wujud razia atas kedisiplinan serta ketentraman warga Satpol PP pula melaksanakan razia ke tempat- tempat pembuatan minuman berakohol berjenis arak di Kabupaten Pasaman Barat
5. Penguasa Kabupaten Pasaman Barat(Pasbar) berperan jelas sehabis penahanan 3 pendamping akan bukan suami istri serta satu germo di Home Stay Farida, Nagari Selokan, Kecamatan Koto Balingka, atas Rabu 22 Mei 2024.

Dalam menangani lanjuti hasil penahanan itu, Pemkab Pasbar bersama figur warga setempat mengadakan rapat di Kantor Camat Koto Balingka, Jumat 31 Mei 2014. Rapat dihadiri oleh Kasatpol PP Pasbar, Kadis DPMPTSP, Camat Koto Balingka, Danramil Air Bangis, Kapolsek Bengawan Beremas, Orang tua Nagari Selokan, Bamus, Jorong se- Nagari Selokan, figur warga, figur agama, serta figur adat Koto Balingka.

Dalam rapat itu, Plt. Kasatpol PP Pasbar Edison Zelmi mengatkan kalau ketetapan jelas didapat buat melawan penyakit warga serta melindungi kedisiplinan biasa. Salah satu tahap penting akan diputuskan yakni penutupan Home Stay Farida sampai batasan durasi akan tidak didetetapkan.

Penutupan ini, ialah jawaban langsung keatas kegiatan bawah tangan akan ditemui di tempat itu. Tidak hanya itu, sambungan dalam rapat pula menyudahi buat menutup seluruh posisi akan dipakai selaku tempat kegiatan penyakit warga, tercantum kafe- kafe akan sediakan Orang Penghibur(OP). Penutupan ini hendak dicoba secepatnya serta atas cara berbarengan atas mengaitkan semua pihak berhak serta warga.

Selanjutnya catatan Rekapitulasi pelanggaran Perda Nomor 13 Tahun 2018 atas pergantian Perda Nomor 9 Tahun 2017 Mengenai Keamanan serta Kedisiplinan Biasa tahun 2024



Gamabr 1. catatan Rekapitulasi pelanggaran Perda Nomor 13 Tahun 2018 atas pergantian Perda Nomor 9 Tahun 2017

Bersumber atas pelanggaran- pelanggaran akan di jalani oleh bermacam atas golongan warga bagus owner tempat ataupun wisatawan keduanya bersama melanggar Perda yan sudah di tetapkan Penguasa Wilayah Pasman Barat, hingga dapat pengarang simpulkan Pelaksanan Perda Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 Mengenai Keamanan serta Kedisiplinan Biasa belum terselenggara maksimum di Nagari Selokan paling utama oleh para penegak Peraturan Wilayah, karna sedang banyaknya pelanggaran akan di dapati keatas Perda itu.

Paling utama atas kedai kopi serta karaoke di Nagari Selokan sedang sediakan minuman berakohol, perempuan penghibur, serta ruang tertutup ini pula jadi PR buat rezim setempat bagaiman triknya membasmi penyakit- penyakit warga.

Bersumber atas hasil riset pengarang memandang penanda tidak terimplementasikan Peraturan Wilayah Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 Mengenai Keamanan serta Kedisiplinan Biasa terdapat sebuatan aspek akan memefeli:

1. Komunikasi: Minimnya komunikasi warga setempat atas petugas penegak perda, bila komunikasi warga berjalan bagus atas petugas hingga itu hendak memudahkan pihak penegak Perda dalam melaksanakan razia keatas Kafe- kedai kopi serta karaoke akan melanggar.
2. Sumberdaya: Minimnya sumberdaya ataupun perhitungan buat melaksanakan penegakkan peraturan wilayah, karna atas pihak petugas penegak perda melaporkan bila ingin turun kelokasi hingga wajib mempunyai bayaran pemindahan akan lumayan.
3. Area: Karna minimnya pemahaman warga setempat keatas peraturan akan sudah di tetapkan Rezim Wilayah, alhasil banyaknya permasalahan pelanggaran akan terjalin di Kenagarian Selokan.
4. Petugas: Karna minimnya responsif atas petugas penegak Peraturan Wilayah keatas Pelanggaran-Pelanggaran akan terdapat di Kenagarian Selokan, serta kurang jelas keatas tempat- tempat akan melanggar determinasi Perda alhasil tidak memunculkan efel kapok buat pelakon pelanggara.

A. Pemikiran Fikih Siyasah Tanfidziyah keatas Penegakkan Peraturan Wilayah Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 Di Nagari Parit

Atas begitu, Aplikasi Peraturan Wilayah Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 bisa di pahami selaku buatan atas kewajiban Rezim Wilayah dalam menciptakan kemantapan sosial akan searah atas anutan Islam, spesialnya dalam kondisi ikatan dampingi masyarakat serta usaha melindungi keamanan khalayak.

Kasus ini di meninjau atas rancangan fiqh Siyasah Tanfidziyah akan bermaksud buat memantapkan peraturan- peraturan Negeri serta buat menciptakan faedah pemeluk orang. Sebab didalam fiqh siyāsah Tanfidziyah umumnya cuma mangulas bab kenegaraan atas bidang Perundang-undangan dan persesuaian Hukum Islam atas prinsip- prinsip keimanan serta realisasi atas faedah orang akan penuhi kebutuhannya, dan anutan agama Islam melakukan kebaikan buat kedisiplinan biasa.

Perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah keatas keamanan serta kedisiplinan biasa warga di Nagari Selokan belum maksimum cocok atas akan d jelaskan Peraturan Wilayah Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 mengenai keamanan serta kedisiplinan biasa, karna minimnya pemahaman hukum, sedikitnya pengawasan, karna efel atas adat luar, serta sedang banyaknya oknum- oknum owner kedai kopi serta karaoke akan melanggar ketentuan Perda itu apalagi terdapat masyarkat akan mengatakan owner kedai kopi itu mempunyai dekingan atas orang per orang petugas Kepolisian, alhasil owner kedai kopi mempunyai kegagahan buat membuka kedai kopi serta Karaoke akan sediakan ruang tertutup, minuman berakohol, serta perempuan penghibur. Telah nyata itu

melanggar determinasi atas Perda Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 mengenai keamanaan serta kedisiplinan biasa.

Penerapan Peraturan Wilayah di Nagari Selokan ini belum berjalan atas cara maksimum semacam tujuan Perda ini di buat di efelkan sebab bebarapa Aspek, sebab terdapatnya aspek penghalang akan terjalin dilapangan, pengarang memandang atas bebrapa aspek akan berhubungan atas Peraturan Wilayah Pasaman Barat No 13 Tahun 2018 Mengenai Keamanan serta Kedisiplinan Biasa tujuan Perda ini supaya warga terikat serta taat keatas Perda akan di buat atas norma- norma supaya terwujudnya keamanan serta kedisiplinan biasa dan tiap orang mempunyai hak buat memperoleh proteksi keatas bahaya ancaman, kekacauan selaku efel atas tidak tertibnya warga.

Tidak terimplementasinya Peraturan Wilayah Pasaman buat atasngan Fikih Siyasah Tanfidziyah kerena belum cocok atas prinsip- prinsip Fikih Siyasah Tanfidziyah:

1. Prinsip ketaatan atas Allah serta Rasul(ith' atul- Lahi wa Rasulih)
   Artinya yakni terdapatnya warga akan tidak mentaati perintah Allah serta atasan mengenai tidak menfasilitasi atau mengosumsi minuman keras, sediakan perempuan penghibur di kedai kopi atau karaoke, serta seluruh pelamggaran akan di jalani oleh warga Nagari Parit
2. Penguatan Hukum(Iqamatul Hudud) Karna kurang tegasnya penegakkan Perda atas petugas akan berhak semacam atas Perda dipaparkan buat akan melanggar hingga hendak dikenakan Ganjaran sosial serta ganjaran kompensasi, namum atas faktanya buat kedai kopi serta tempat karaoke akan didapati melanggar cuma di kena ganjaran sosial saja tidak lansung atas ganjaran dendanya.
3. Faedah pemeluk(Al- maslahah) Karna minimnya rezim setempat buat melindungi kemaslahtan warganya, semacam di Kenagarian Selokan kuranngya aksi jelas keatas kedai kopi serta karaoke akan melanggar alhasil mengganggu ketertban di warga Nagari Selokan.

Kelangsungan serta akuntabilitas(Al- infitah wa al- abang' uliyah) Minimnya kelangsungan warga keatas Rezim setempat keatas pelanggaran- pelanggaran akan terdapat di Kenagari Selokan, alhasil menimbulkan sulit terimplementasi Peraturan Wilayah Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 Mengenai Keamanan serta Kedisiplinan Umum.

KESIMPULAN

1. Penerapan Peraturan Wilayah di Kenagarian Selokan ini belum terselenggara atas maksimum paling utama oleh petugas penegak Peraturan Wilayah serta warga setempat, teruji atas terdapatnya kasus keamanan serta kedisiplinan biasa di warga. Pengarang memandang aspek efeli terbentuknya aksi akan amat amat menggelisahkan di warga semacam sedang banyaknya kedai kopi serta karaoke akan meneydiakan minuman barkohol, perempuan penghibur, ruangan tertutup. Perihal ini tidak cocok atas determinasi Peraturan wilayah Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 atas Artikel 12 buatan 1, 2, 3, 5 Faktornya tidak terimplementasikan Peraturan Wilayah Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 Mengenai Keamanan serta Kedisiplinan Biasa terdapat sebuatan aspek akan memefeli: Komunikasi, Minimnya komunikasi warga setempat atas petugas penegak perda, bila komunikasi warga berjalan bagus atas petugas hingga itu hendak memudahkan pihak penegak Perda dalam melaksanakan razia keatas Kafe- kafe serta karaoke akan melanggar.
2. Kajian Fikih Siyasah Tanfidziyah keatas Aplikasi Peraturan Wilayah Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 mengenai Keamanan serta Kedisiplinan biasa di Nagari Selokan berderai bertakan atas kesesuaian ketentuan itu atas prinsip- prinsip syariat Islam spesialnya dalam kondisi pengurusan kedisiplinan serta keseimbangan sosial. Fikih Siyasah Tanfidziyah, akan

berhubungan atas penerapan kebijaksanaan rezim, menggaris bawahi berartinya melindungi faedah bersama, melempangkan kesamarataan, dan mencegah hak- hak masyarakat warga.
Tidak terimplementasinya Peraturan Wilayah Pasaman buat atasngan Fikih Siyasah Tanfidziyah kerena belum cocok atas prinsip- prinsip Fikih Siyasah Tanfidziyah: Prinsip ketaatan atas Allah serta Rasul(ith' atul- Lahi wa Rasulih), Artinya yakni terdapatnya warga akan tidak mentaati perintah Allah serta atasan mengenai tidak menfasilitasi atau mengosumsi minuman keras, sediakan perempuan penghibur di kedai kopi atau karaoke, serta seluruh pelamggaran akan di jalani oleh warga Nagari Parit

DAFTAR PUSTAKA

A. Dzajuli, Fiqh Siyasah: Aplikasi Faedah Ummat dalam Pancang pancang Syariah,(Bandung: Prenada Alat, 2003), 277.

Adinda Reza Novita Dkk," Aplikasi Artikel 9 Peraturan Walikota Bos Lampung No 43 Tahun 2021 mengenai kedudukan biro profesi biasa serta penyusunan ruang", Harian Studi Ilmu Hukum, Sosial, Politik, 1, nomor. 6(2024): 82

Andiko, Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penanganan Permasalahan Fikih Siyasah Modern,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 12.

FIRDAUS, Meter. Ridwan Ainun; EVIANY, Eva. Harian Tatapamong, 2023,.

Geledek Setiawan, Aplikasi Dalam Birokrasi Pembangunan(Jakarta: Gedung Pustaka, 2004), 39.

Khalid Ibrahim Jindan, Filosofi Politik Islam: Analisis Kritis Ibnu Taimiyah Mengenai Rezim Islam,(Surabaya: Risalah Buatnda, 1999), 56.

Milimeter. Azami, Perkataan nabi Nabawi serta Asal usul Kodifikasinya,(Pejanten Barat: Pustaka Firdaus, 2000), 13.

Muhadi Zainuddin serta Abd. Mustaqim," Riset Kepemimpinan Islam Analisis Normatif serta Histor" i,([ttp]:[tp],[tth]), 28- 29

Mulyadi Deddy, Riset Kebijaksanaan Khalayak serta Jasa Khalayak(Bandung, Alfabeta, 2015), 47

Mulyana, Raaizza Inda Dzil Arsyilaa, harian tatpamong 4 maret 2022, 16- 17

Mulyana, Raaizza inda zil arsyla: Harian tatapamong, aplikasi peraturean wilayah nomor 13 tahun 2018 mengenai keamana serta kedisiplinan umuim oleh Satpol PP di Kabupaten Pasaman Baratprovinsi sumatera Barat.

Nurcholis Madjid, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Ajaran Politik,(Jakarta: Style Alat Pratama, 2001), 273.

Peratuaran wilayah Pasaman Barat no 13 tahun" tentag keamanan serta kedisiplinan biasa" 2018 3- 6

Peraturan Wilayah Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018' mengenai keamanan serta kedisiplinan biasa'

Peraturan wilayah Pasaman Barat No 9 tahun 2017" mengenai keamanan serta kedisiplinan biasa" 10

Perda Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017, mengenai keaman serta kedisiplinan biasa, 8

Rokilah, Gairah Negeri Indonesia, Batin Hukum Harian Ilmu Hukum, Vol. 2 nomor, 1, tahun 2016, 16

Sugiyono, Tata cara Riset Kualitatif serta R& D(Bandung: Alfabeta, 2008), 243

Mengenai“ Perda selaku pemaparan lebih lanjut peraturan perundang- undangan akan lebih besar”, bisa dirijuk atas artikel 12 Hukum No 12 Tahun 2011 serta Artikel 136 buatan(3) UndangUndang No 23 Tahun 2014.

Wahbah al- Zuhayli, Ushul al- Fikih al-`Islami,(Damaskus: Dar al- Fikr, 2001) 1, 18

Tanya jawab kasi rezim, Diflayzar, kantor orang tua nagari selokan, 19 juni 2025

Tanya jawab kepala PPUD Saripin, SE, atas hari senin bertepatan atas 16 Desember 2024.

Tanya jawab kepala subbuatan pelacakan serta investigasi, Endrawanis, atas hari senin bertepatan atas 16 Desember 2024.

Tanya jawab, ayah Handoko Se, Milimeter, Kantor Satpol PP, Kamis, 08 Mei 2025

Tanya jawab, Ayah Saripin, SE, Kantor Satpol PP, Kamis, 08 Mei 202